



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SULTANUDIN**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **683604**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	---
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	262.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
11.000.000		
4. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
5. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
6. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	
10.000.000		
7. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2016, HASIL SENDIRI	Rp.	
11.000.000		
8. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2013, HASIL SENDIRI	Rp.	
100.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	---
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	---
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	800.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	262.800.000
III. HUTANG	Rp.	18.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	244.800.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.